

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Terdapat beragam pengertian anak, merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis dapat diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁴

R.A. Kosnan mengemukakan pendapatnya bahwa anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵ Prespektif sosiologi sendiri memandang anak merupakan bagian dari masyarakat. Anak dapat melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga maupun masyarakat luas.¹⁶

Terdapat beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun diantara beberapa pengertian anak dalam perundang-undangan tersebut, tidak ada kesamaan satu sama lain antar

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko. Hal. 25

¹⁵ Arif Gosita. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 28

¹⁶ Hartini G Kartasapoetra. 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 53

undang-undang dikarenakan perbedaan latar belakang dan maksud tujuan masing-masing undang-undang. Berikut uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan :

1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP pengertian anak termuat didalam Pasal 45, yang mana dijelaskan bahwa pada intinya anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum mencapai usia 16 tahun. Oleh karena itu kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang yang terbaru, telah dijelaskan mengenai definisi anak-anak yang termasuk kedalam objek hukum perlindungan anak. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dijelaskan secara jelas dalam Pasal 1 ayat 1 yang dimana dapat dikatakan seorang anak apabila masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maupun anak yang belum dilahirkan atau anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

¹⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹⁸ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjelaskan mengenai pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 ayat 5 dapat dikatakan anak apabila seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".¹⁹

4) Kovensi Hak Anak

Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁰

Menurut Pasal 1 ayat 3, dapat dikatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²¹

¹⁹ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian anak seperti disebutkan di atas tidak ada batas umur seseorang dapat dikatakan anak secara jelas, perlu untuk ditentukan batasan umur anak secara jelas dan lugas agar tidak menimbulkan permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Juvenile Delinquency

1. Pengertian Juvenile Delinquency

Juvenile delinquency mempunyai arti kenakalan anak atau dengan kata lain dapat disebut dengan kenakalan remaja.²² Kata *juvenile* berasal dari bahasa Latin “*juvenilis*” yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan kata *delinquent* juga berasal dari bahasa latin “*delinquere*” yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dan dursila.²³

Kartono berpendapat bahwa *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial yang berakibat mereka dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.²⁴ *Delinquency* merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih di usia sekolah, dan jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindakan kejahatan.

²² Sudarsono. 1991. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal. 5

²³ Kartini Kartono. 1998. *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta. CV. Rajawali. Hal. 6

²⁴ Kartini Kartono, 2015. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 8

Menurut Sahetapy, kenakalan remaja merupakan masalah kenakalan anak menyangkut pelanggaran norma yang hidup dalam masyarakat. Pelanggaran norma merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu.²⁵ Psikolog Drs. Bimo Walgito menjelaskan istilah dari *Juvenile Delinquency* mencakup setiap perbuatan tertentu. Apabila perbuatan itu dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, sesuatu yang melawan hukum.²⁶

Dari penjelasan yang termuat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenakalan anak atau kenakalan remaja merupakan tindakan perbuatan sebagian remaja yang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh remaja tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain disekitarnya. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang mengarah pada suatu tindak pidana. Ditinjau dari dari pengertian pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur *Juvenile Delinquency* adalah adanya suatu tindakan atau perbuatan, tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum, dan dirasakan atau ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela, serta dilakukan oleh anak-anak.

²⁵ Marwan setiawan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor. Galia Indonesia. Hal. 100

²⁶ Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 11

2. Macam-Macam Juvenile Delinquency

a. *Delinquency Individual*

Delinkuensi individual merupakan bentuk kekacauan mental dalam diri seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya disintegrasi diri dengan kekacauan batin dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku. Hampir seluruh anak yang termasuk dalam delinkuensi individual ini berasal dan besar dari lingkungan keluarga yang brutal, yang diliputi permasalahan keluarga, yang mana keluarga tersebut selalu menyia-nyiakan anak-anaknya. Sehingga anak yang besar dilingkungan seperti ini tidak mampu menjalin kedekatan emosional dengan orang lain, sebagai akibatnya anak tidak mempunyai perasaan kemanusiaan dan hati nuraninya sulit diberi peringatan.

27

b. *Delinquency Situasional*

Delinkuensi atau kenakalan jenis ini banyak dipengaruhi oleh stimuli sosial dan tekanan lingkungan sehingga membentuk perilaku buruk pada anak. Kemudian juga kenakalan ini sering dilakukan oleh anak yang normal seperti suka melanggar peraturan, normal sosial, dan hukum formal.²⁸

c. *Delinquency Sistematis*

Delinkuensi sistematis merupakan perilaku menyimpang yang telah disistematiskan dalam suatu kelompok atau gang tersebut sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau sistematis.²⁹

²⁷ Sudarsono, *Op.cit.* hal. 9

²⁸ Kartini Kartono, *Op.cit.* hal. 46

²⁹ *Ibid.*

d. *Delinquency Kumulatif*

Delikuensi jenis ini merupakan konflik budaya kontroversial yang mana terdapat banyak kelompok sosial yang tidak dapat didamaikan karena selalu terlibat dalam persaingan yang didasari oleh rasa dendam dan benci yang sangat mendalam.³⁰

3. Teori-Teori Juvenile Delinquency

a) Teori Biologis

Teori ini menjelaskan bahwa tingkah laku sosiopatik pada anak-anak dapat muncul karena beberapa faktor yakni fisiologis dan struktur jasmaniah yang dibawa sejak lahir.³¹

b) Teori Psikogenesis

Dalam teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, internalisasi diri yang keliru, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena faktor orang tua sibuk berkarir.³²

c) Teori Sosiologis

Dalam teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku delinquen pada anak-anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis anak tersebut.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hal, 25

³² Indah Sri Utami. 2012. *Aliran Dan Teori Kriminologi Cetakan ke-2*. Yogyakarta. Thafa Media. Hal. 48

³³ Kartini Kartono, *Op.cit.* hal. 25

d) Teori Subkultural Delikuensi

Dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku jahat adalah sifat-sifat struktural sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal tersebut disebabkan oleh status sosial ekonomi yang rendah. Faktor ini dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan.³⁴

Kesimpulan dasar dari teori ini menyebutkan bahwa perilaku *delinquent* di kalangan remaja, merupakan gambaran ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah. Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya sehingga keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dalam perilaku menyimpang yang bersifat tidak bermanfaat, dengki, dan jahat.³⁵

C. Tinjauan Umum kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang mempunyai arti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi merupakan ilmu/pengetahuan yang menjelaskan tentang kejahatan. Para ahli memberikan penjelasan berbeda mengenai kriminologi sebagai berikut:³⁶

- a. Bonger memberikan penjelasan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

³⁴ Kartini Kartono, *Op.cit.* hal. 46

³⁵ Indah Sri Utami, *Op.cit.* hal. 100

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 9

- b. Sutherland menjelaskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
- c. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Berbicara mengenai ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kriminologi murni, yang terdiri dari:³⁷

- 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- 5) Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

b. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:³⁸

- 1) Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

³⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.* hal. 9

³⁸ *Ibid.*

- 2) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
- 3) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan Shuterland memberi penjelasan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga bagian utama, antara lain:³⁹

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Pada uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.⁴⁰

2. Teori – Teori Kriminologi

a. Teori Differential Association

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya yang berjudul *Principlep of Criminology*

³⁹H. M Ridwan dan Ediwarman. 1994. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan. USU Press. Hal. 79

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.* hal. 13

(1934). Sutherland berpandangan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial. Terdapat dua versi teori *differential association*. Versi pertama Sutherland tertuju pada pengaruh konflik budaya, keberantakan sosial, dan *differential association*. Berdasarkan pengaruh tersebut, kemudian ia menyimpulkan bahwa muncul teori ini didasarkan pada 3 hal, yaitu :

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola – pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
 - 2) Kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
 - 3) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.⁴¹
- Kemudian versi kedua, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Artinya bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari orang tua akan tetapi diperoleh dari hasil yang dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.⁴²

b. Teori Differential Opportunity

Teori ini dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity : a theory of Deliquent Gang* (1960). Teori ini pada dasarnya berorientasi dan membahas Penyimpangan di wilayah perkotaan. penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang

⁴¹ Indah Sri Utami, *Op.cit.* hal 90

⁴² *Ibid.* hal. 91

dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun ilegal.⁴³ Cloward dan Ohlin berpandangan bahwa para remaja akan melakukan kejahatan apabila terhadap tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan serta keadaan yang tidak normal, artinya bahwa para remaja tidak akan melakukan kejahatan dan akan taat pada norma-norma apabila tidak terdapat tiga hal tersebut di atas yakni tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan dan keadaan yang tidak normal.⁴⁴

c. Teori Anomi

Pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang mana istilah ini dipergunakan untuk mendeskripsikan keadaan deregulasi didalam masyarakat karena tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga menyebabkan deviasi.⁴⁵

d. *Social Learning Theory*

Teori pembelajaran sosial (social learning theory) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

e. Teori *Culture Conflict*

Teori kultur konflik pertama kali dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya yang berjudul *Culture Conflict and Crime*. Konflik merupakan permasalahan nilai sosial, kepentingan dan norma. Konflik norma perilaku dapat

⁴³ *Ibid.* hal.102

⁴⁴ *Ibid.* hal. 104

⁴⁵ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Cetakan ke-14 Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 59

timbul karena perbedaan nilai sosial antar kelompok. Begitu juga dengan konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota.⁴⁶

f. Teori *Labeling*

Teori ini merupakan teori baru yang muncul pada awal tahun 1960-an yang mana untuk mengukur atau mengetahui adanya kejahatan. Teori labeling menekankan pada dua hal yaitu permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu dicap atau diberi label serta efek dari label tersebut sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai permasalahan kejahatan yang dilakukan, FM Lemert membedakan dalam tiga bentuk penyimpangan yaitu individual deviasi yang diakibatkan oleh psikis dari dalam, situasional deviasi yang diakibatkan oleh tekanan dari keadaan, dan sistematik deviasi sebagai pola-pola perilaku kejahatan yang terorganisir dalam sistem tingkah laku.⁴⁷

Teori-teori tersebut di atas berkaitan erat dengan juvenile delinquency yang mana membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja sebagaimana dinyatakan oleh Albert Bandura tokoh utama teori pembelajaran sosial bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh bagaimana anak tersebut belajar bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain terutama dari keluarga budaya dan media massa.⁴⁸

⁴⁶ Indah Sri Utami, *Op.cit.* hal. 106

⁴⁷ *Ibid*, hal. 108

⁴⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.* hal. 55

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu kriminologi Teoritis dan Kriminologi praktis.

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap pembagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Antara lain:⁴⁹

1) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Seperti contoh menurut Lambrosso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosial criminal adalah :

- a) Etiologi sosial : Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab - sebab timbulnya kejahatan.
- b) Geografis : Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- c) Klimatologis: Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

⁴⁹ Ismail Rumadan. 2007. *Kriminologi*. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal. 11

3) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- a) Tipologi : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan golongan penjahat.
- b) Psikologi sosial criminal : Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.

5) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan.

Cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah :⁵⁰

1) Criminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan, penyediaan sarana olah raga dan lainnya.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 7

2) Politik Criminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menetapkan hukum sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahan serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadiladilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan.

3) Kriminalistik

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Bonger membagi kriminologi sebagai berikut :⁵¹

- a) *Antropologi criminal* Suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat.
- b) *Sosiologi criminal* Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial.
- c) *Psychology criminal* Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma- norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

⁵¹ Chainur Arrasjid. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*. Medan. Jurnal Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. Fakultas Hukum. USU. Hal. 28

Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.

- d) *Psycho dan neuro criminal* Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e) *Penology* Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Menurut Sutherland pembagian kriminologi sebagai berikut :⁵²

- a) Sosiologi hukum Ilmu yang memandang kejahatan itu sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Pada intinya yang menentukan suatu perbuatan itu jahat atau tidak adalah hukum. Oleh karena itu, di dalam mencari sebab-musabab kejahatan harus dilihat dari faktor-faktor apa yang menyebabkan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana.
- b) Aetiologi kejahatan Merupakan cabang dari ilmu kriminologi yaitu suatu ilmu yang mempelajari suatu sebab-musabab seseorang melakukan kejahatan.
- c) Penology Ilmu pengetahuan tentang hukuman. Sutherland memasukkan dan menambahkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

⁵² Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Hal. 33

4. Objek Kriminologi

Dengan demikian secara singkat dapat diuraikan bahwa objek kriminologi adalah sebagai berikut :

a. Kejahatan

Kejahatan dari sudut pandang hukum menyebutkan bahwa setiap tingkahlaku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan selama perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundangundangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat menyebutkan batasan kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat. Adapun unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan itu ada tujuh perbuatan yang menimbulkan kerugian : ⁵³

- 1) Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab undang undang hokum pidana (selanjutnya disebut KUHP).
- 2) Harus ada perbuatan.
- 3) Harus ada maksud jahat.
- 4) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- 5) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- 6) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

R.Susilo, mengemukakan bahwa kejahatan sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Maka perundang-undangan itu harus

⁵³ Wahyu Muliono, *Op.cit.* hal. 57

dibuat terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan terjaminnya kepastian yang tertera di Pasal 1 KUHP yang artinya : ⁵⁴

“Tiada suatu perbuatan yang dapat di kenakan pidana selain berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah dibuat sebelumnya”.

b. Pelaku dan Penjahat

Penjahat adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, baik itu berdasarkan hukum nasional (hukum positif) maupun hukum yang dianut dalam masyarakat. Pada umumnya di pikiran masyarakat perkataan “penjahat” berarti mereka yang dimusuhi oleh masyarakat. Adapun jenis penjahat adalah : ⁵⁵

- 1) Penjahat dari kecenderungan (bukan karna bakat)
- 2) Penjahat karena kelemahan (karena kelemahan jiwa sehingga sulit tidak melakukan kejahatan)
- 3) Penjahat karna hawa nafsu dan putus asa.

Menurut Ruth Shonle Cavam ada 9 tipe penjahat yaitu : ⁵⁶

- 1) *The casual offender* Tipe ini sebenarnya belum dapat dikatakan penjahat, tetapi pelanggar kecil, seperti tidak memakai lampu pada malam hari, tidak memakai helm
- 2) *The occasional criminal* Orang ini melakukan kejahatan ringan, seperti orang yang menabrak seseorang sampai luka ringan

⁵⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁵⁵ Wahyu Muliono. *Op.cit.* hal 57

⁵⁶ Marsy Fashadhin. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis.* Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar. Hal. 18

- 3) *The episodic criminal* Disebabkan kerana aemosi yang sangat hebat, sehingga kehilangan control diri
- 4) *The habitual criminal* Mereka yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti pemabuk, pengemis, dan perbuatan yang tertera di dalam pasal 104-485 KUHP. Juga residivist
- 5) *The professional criminal* Pelaku melakukan perbuatan ini sebagai mata pencaharian. Seperti; penyelundupan, korupsi, penjualan narkotika
- 6) *Organized criminal* Pelaku kejahatan yang membentuk organisasi yang rapi untuk melakukan kejahatan
- 7) *The mentally abnormal* Penjahat ini memiliki penyakit psycopatis
- 8) *The normalicious criminal* Perbuatan yang sekelompok masyarakat menuduh perbuatan tersebut, sedangkan kelompok lain menyebut bukan kejahatan
- 9) *The white collar criminal* Kejahatan ini dilakukan oleh seseorang dari upper class di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan baik dibidang ekonomi maupun sosial politik, terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakatnya.

Adapun sebab adanya penjahat antara lain yaitu :⁵⁷

- 1) Pertentangan dan persaingan kebudayaan;
- 2) Perbedaan ideologi politik;
- 3) Kepadatan dan komposisi penduduk;

⁵⁷ Muhammad Mustafa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta. Fisip UI Press. Hal. 16

- 4) Perbedaan distribusi kebudayaan;
- 5) Perbedaan kekayaan dan pendapatan;
- 6) Mentalitas yang labil;
- 7) Faktor lain seperti faktor biologis, psikologi, dan sosioemosional;

Kejahatan dan penjahat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada penjahat disitu pula terjadi kejahatan dan begitupun selanjutnya. Kejahatan kerap kali mengganggu kestabilan dan keamanan dalam masyarakat.

Adapun akibat adanya penjahat dalam masyarakat adalah sebagai berikut :⁵⁸

- 1) Merugikan pihak lain baik materil maupun non materil;
- 2) Merugikan masyarakat secara keseluruhan;
- 3) Merugikan negara;
- 4) Mengganggu kestabilan dalam masyarakat.

D. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Menurut kriminologi, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan bermacam-macam, seperti faktor biologi, faktor psikologis dan psikiatris, dan faktor-faktor sosial kultural, untuk mencari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan maka ada beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu :

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif strain dan

⁵⁸ *Ibid.*

cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompokkelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.⁵⁹

2. Perspektif Biologis

Perspektif Biologis Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu : ⁶⁰

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal atau Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (habitual criminals).
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu : ⁶¹

⁵⁹ Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi Books. Hal. 45

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

E. Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Fenomena kejahatan tindak pidana sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan bentuk masalah sosial, bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁶²

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

⁶² Badra Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 49

a. Upaya Non Penal

Menurut Bardan Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti:⁶³

- Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat;
- Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya;
- Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja;
- Serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh

⁶³ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 46

preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁶⁴

b. Upaya Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁶⁵

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social*

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. Hal. 159

⁶⁵ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 46

defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁶⁶

F. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, tindak pidana disebut juga dengan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁶⁷ Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶⁸
- b. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :⁶⁹
 - 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
 - 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam

⁶⁶ Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* Hal. 182

⁶⁷ Teguh Prastyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 47

⁶⁸ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. Hal. 81

⁶⁹ Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 69

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

- c. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁷⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Secara umum, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu :⁷¹

- a. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu:
- Tindak pidana pembunuhan pada umumnya, yang meliputi tindak pidana yang diatur dalam pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP.
 - Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
- b. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* Hal. 37

⁷¹ Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil.* Jakarta. Djambatan. Hal. 3

1) Tindak pidana pembunuhan biasa

Dalam Pasal 338 KUHP, dikatakan “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dalam rumusan Pasal 338 KUHP terdapat unsur-unsur, yaitu :

- Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain
- Unsur subyektif : dengan sengaja

Perlu dikemukakan, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 syarat, antara lain :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya akibat berupa kematian
3. Adanya hubungan sebab akibat

Penjelasan mengenai Pasal 338 KUHP dapat ditarik pemahaman bahwa perbuatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan harus timbul seketika itu juga, perbuatan yang dilakukan harus ditujukan kepada seseorang. Dalam melakukan pembunuhan harus merupakan perbuatan aktif atau positif, artinya dengan menggunakan gerakan bagian tubuh walaupun perbuatan sekecil apapun. Perbuatan yang dilakukan harus menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Akibat matinya seseorang tidak harus timbul seketika itu juga, akan tetapi bisa timbul beberapa saat setelah dilakukan perbuatan tersebut.⁷²

⁷² *Ibid.* hal, 5

2) Tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasikan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 339 KUHP, menyatakan bahwa :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Tindak pidana dalam Pasal 339 KUHP pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana biasa sebagaimana Pasal 338 KUHP, akan tetapi karena ada unsur yang memberatkan maka diancam pidana yang lebih berat. Dalam Pasal 339 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP baik unsur obyektif maupun subyektif
2. Unsur diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain
3. Unsur dengan maksud :
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, atau
 - c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk :
 - Menghindari diri sendiri atau peserta lain dari pidana, atau

- Memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.⁷³

3) Tindak pidana pembunuhan berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana maksimumnya berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 340 KUHP mengatakan

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Dalam rumusan Pasal 340 KUHP dapat diuraikan unsur-unsurnya, antara lain:

1. Unsur obyektif : menghilangkan nyawa orang lain
2. Unsur subyektif :
 - Unsur dengan sengaja
 - Unsur dengan rencana terlebih dahulu

Dilihat dari unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 340 KUHP, bahwa tindak pidana pembunuhan berencana pada hakikatnya merupakan tindak pidana biasa dalam Pasal 338 KUHP yang ditambah dengan adanya unsur direncanakan terlebih dahulu.⁷⁴

⁷³ *Ibid.* hal, 9

⁷⁴ *Ibid.* hal, 20

4) Pembunuhan Anak atau Bayi

Jenis tindak pembunuhan bayi secara eksplisit diatur dalam ketentuan pasal 341, 342 dan 343 KUHP. Pembunuhan terhadap bayi yang diatur dalam ketiga pasal tersebut merupakan jenis pembunuhan yang paling khusus. Pembunuhan bayi pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu pembunuhan bayi biasa (Pasal 341 KUHP) dan pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP).

a. Pembunuhan bayi biasa

Diatur dalam Pasal 341 KUHP, dikatakan bahwa "Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun."

Berdasarkan rumusan Pasal 341 KUHP, terdapat unsur-unsur yang meliputi:

1) Unsur obyektif :

- a) Seorang ibu
- b) Karena takut akan ketahuan melahirkan anak
- c) Pada saat anak dilahirkan atau
- d) Tidak lama kemudian (setelah anak dilahirkan)
- e) Merampas nyawa anak itu

2) Unsur subyektif : dengan sengaja

b. Pembunuhan anak berencana

Diatur dalam Pasal 342 KUHP, menyatakan "Seorang ibu, untuk melaksanakan niat yang sudah ditentukan karena takut akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana paling lama sembilan tahun."

Berdasarkan rumusan Pasal 342 KUHP, terdapat unsur-unsur yang meliputi:

- 1) Unsur seorang ibu
- 2) Adanya niat yang sudah ditentukan sebelumnya
- 3) Karena takut akan ketahuan melahirkan anak
- 4) Pada saat anak dilahirkan, atau tidak lama kemudian setelah anak dilahirkan
- 5) Merampas nyawa anak
- 6) Dengan sengaja

Berdasarkan unsur-unsur diatas, bahwa pembunuhan anak berencana pada dasarnya merupakan pembunuhan anak biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP yang ditambah adanya unsur rencana terlebih dahulu. Unsur rencana terlebih dahulu yang ada dalam Pasal 342 KUHP Nampak dari adanya niat yang telah ditentukan sebelumnya.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.* hal, 31

5) Pembunuhan atas permintaan korban

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah euthanasia atau pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam ketentuan Pasal 344 KUHP, yang mengatakan:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Dapat diuraikan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 344 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur menghilangkan atau merampas nyawa orang lain
- 2) Atas permintaan orang itu sendiri
- 3) Yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati

Euthanasia merupakan perbuatan yang dilarang yang pada pelakunya dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, euthanasia merupakan tindak pidana.⁷⁶

6) Mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong atau memberi sarana untuk bunuh diri.

Diatur dalam Pasal 345 KUHP yang menyatakan “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Berdasarkan rumusan Pasal 345 KUHP, tersimpul bahwa yang melakukan pembunuhan adalah korban itu sendiri atas dorongan, bantuan atau pemberian

⁷⁶ *Ibid.* hal, 44

sarana dari orang lain. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut antara lain :

1) Unsur obyektif :

- a) Mendorong orang lain untuk bunuh diri
- b) Menolong orang lain untuk bunuh diri
- c) Memberikan sarana untuk bunuh diri
- d) Orang tersebut jadi bunuh diri

2) Unsur subyektif : dengan sengaja

Berdasarkan unsur-unsur diatas, dapat disimpulkan perbuatan yang dilarang terdiri dari 3 macam, yaitu :

- a. Dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri
- b. Dengan sengaja menolong orang lain untuk bunuh diri
- c. Dengan sengaja memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.* hal, 49